
Judul	: Pembangunan Gedung Baru DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
Tanggal	: Jumat, 28 Agustus 2015
Surat Kabar	: Suara Pembaruan
Halaman	: A5

Pembangunan Gedung Baru DPR Berpotensi Rugikan Rakyat

Jika Pemerintah Menolak, Proyek Tak Jalan

[JAKARTA] DPR telah merencanakan anggaran pembangunan gedung baru senilai Rp 2,7 triliun secara *multiyear*. Dalam RAPBN 2016, rencananya akan dimasukkan Rp 700 miliar.

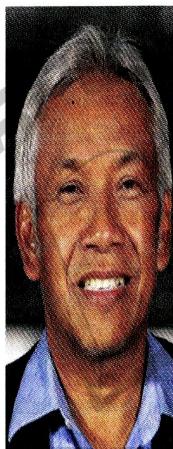
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mempertanyakan dana pembangunan gedung baru DPR dari alokasi APBN tersebut.

“Ternyata Fitra menemukan, dugaan pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan risiko fiskal,” kata Yenny Sucipto saat dihubungi *SP*, di Jakarta, Kamis (27/8).

Jika dana optimalisasi ini diambil, lanjut Yenny, maka berdampak pada daerah-daerah. Khususnya, peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok akan terhambat. “Rakyat menjadi tetap mis-



FOTO: DOK SP
Yenny Sucipto



Agus Hermanto

kin. Jadi ini bukti politik anggaran DPR sungguh menyaliti rakyat,” katanya.

Selain itu, dia menambahkan, hingga kini belum jelas, Rp 2,7 triliun itu untuk pembiayaan apa saja.

Potensi penggelembungan (*mark up*) pun diprediksi sangat tinggi.

Uang triliunan rupiah itu, sambungnya, juga sema-

yang sedang terjadi dalam pengusulan pembangunan gedung baru DPR.

“Sebenarnya makin kecilnya aroma permainan dari rencana pembangunan gedung baru DPR itu diusulkan oleh sejumlah pihak di DPR,” kata Lucius, Rabu (26/8).

Dia menduga, bisa jadi terkait rencana pembangunan gedung baru hanya disain oleh satu dua orang atau sekelompok orang di parlemen dan kesetjenan DPR.

Usulan

Sementara itu, unsur Pimpinan DPR tetap tak mau mengeluarkan usulan pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, walaupun sebagian anggota dewan menilai posisi keuangan negara sedang tak dalam kondisi prima untuk dimintai pembiayaannya.

Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, ada aroma ‘busuk’

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, pembangunan gedung baru DPR itu diusulkan oleh sejumlah pihak di DPR.

terlaksanakan. Sehingga kita lihat saja prosesnya, biar prosesnya berjalan. Apabila memang pemerintah bisa melihat urgensi dan juga menyetujui ini, baru bisa jalan,”

“

Ternyata Fitra menemukan, dugaan pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan risiko fiskal.

Usulan itu harus masuk ke nota keuangan

Pemerintah, yakni dalam pembahasan RAPBN 2015. Tapi Agus tak menyatakan bersedia menarik usulan itu. Namun, malah menegaskan bahwa program itu takkan terjadi bila pemerintah menolaknya.

“Suatu program, apabila pemerintah tidak menyetujui, ya mungkin tidak bisa

kata Agus, Rabu (26/8).

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki dana untuk membangun gedung baru DPR, yakni dari pos optimalisasi anggaran.

Dia berjanji akan terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan pembahasan usulan yang belum disetujui pemerintah itu. [MJS/W-12]